

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik Suriah yang merupakan dampak dari musim semi Arab (Arab Spring), yang terus berakumulasi menjadi konflik bersenjata yang kompleks, menyebabkan dampak kemanusiaan yang besar, dengan ribuan korban jiwa dan jutaan orang menjadi pengungsi. Infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah mengalami kehancuran. Upaya mencari solusi perdamaian melalui konferensi dan mediasi dari berbagai pihak belum berhasil, dan konflik terus berlanjut hingga saat ini.

Konflik bersenjata di Suriah telah memberikan dampak yang serius pada penyandang disabilitas. Mereka menghadapi berbagai tantangan dalam mencari bantuan kemanusiaan, mendapatkan pendidikan, dan mengatasi dampak psikologis konflik. Mereka juga berisiko mengalami diskriminasi, pelecehan, dan bahkan pemusnahan. Maka dari itu, dukungan dari negara, Lembaga, dan organisasi kemanusiaan sangat penting untuk membantu meningkatkan kondisi dan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah-wilayah konflik Suriah.

Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi, dan akses terhadap perawatan medis dan rehabilitasi. Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I dan II, serta Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan konvensi internasional lainnya yang berbasis pada Hukum Hak Asasi Manusia menyediakan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Pentingnya aspek sistem inklusi disabilitas dalam interpretasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia telah ditekankan oleh badan-badan hak asasi manusia PBB. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik guna melindungi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko dan darurat kemanusiaan.

Republik Arab Suriah telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait hak asasi manusia, termasuk Konvensi Hak-Hak Disabilitas. Namun, konflik bersenjata yang berkepanjangan telah menyulitkan implementasi dan pemenuhan konvensi-konvensi tersebut. Pemerintah Suriah terindikasi melanggar berbagai konvensi internasional terkait hak asasi manusia selama konflik berlangsung, termasuk serangan terhadap warga sipil yang di dalamnya mencakup penyandang disabilitas, penggunaan senjata terlarang, dan merekrut anak-anak sebagai prajurit anak.

UNHRC memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Mereka dapat memantau, mendokumentasikan, dan menyusun laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengurangi intensi konflik guna menghindari pelanggaran kemanusiaan yang lebih besar. Meskipun memiliki wewenang, UNHRC memiliki batasan dalam mengatasi situasi hak asasi manusia di Suriah, termasuk ketergantungan pada kerjasama dari pihak terkait, akses terbatas ke wilayah konflik, dan keterbatasan sanksi dan penegakan.

Di Suriah, pemerintah telah memiliki undang-undang dan peraturan nasional tentang penyandang disabilitas, namun terdapat keterbatasan dalam implementasinya, terutama selama periode konflik yang berkepanjangan. Upaya penyelenggaraan layanan bagi penyandang disabilitas di Suriah menghadapi banyak tantangan, termasuk minimnya data yang akurat, keterbatasan sumber daya, dan dampak negatif dari pengekangan sepihak yang

mempengaruhi ketersediaan kapasitas keuangan dan teknis lembaga-lembaga yang menyediakan layanan.

Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja Suriah berusaha meningkatkan kualitas layanan di pusat-pusat perawatan dan menjalankan program pelatihan tentang pembangunan sosial dan integrasi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti UNDP dan UN-ESCWA, dalam proyek rehabilitasi beberapa pusat layanan yang rusak akibat konflik.

Meskipun UNHRC dan pemerintah Suriah telah berupaya mengatasi isu-isu hak asasi manusia dan penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi tetap kompleks akibat situasi konflik yang berkepanjangan dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional lainnya untuk terus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta meningkatkan kondisi penyandang disabilitas di Suriah guna mencapai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang lebih baik di masa depan.

